

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, L., 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Bandung: Keni Media.
- Alexy, Robert, 2018, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford: Oxford University Press.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2019, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2021, *Asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Bahsan, M., 2013, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Budiono, Herlien, 2015, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cremer, Hans, 2018, *The Principle of Proportionality in Law*, Berlin: Springer.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Kepailitan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartkamp, A. S., 2013, *Contract Law in the Netherlands*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Hartkamp, Arthur, 2018, *Good Faith in Civil Law Systems*, Leiden: Brill.
- Lubis, S., 2019, *Prinsip Eksekusi Hak Tanggungan*, Medan: Pustaka Bangsa.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Teori dan Metode Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto, 2020, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Rawls, John, 2012, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
- Setiawan, R., 2019, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2019, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, 2018, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Susanti, F., 2021, *Reformasi Kepailitan*, Bandung: Keni Media.
- Susanto, T., 2019, *Prinsip Keputusan dalam Perjanjian*, Jakarta: Kencana.

Ariansyah Kurniawan, 2026

ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR SEPARATIS TERHADAP DEBITOR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/pdt.Sus Pailit 2020)

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

B. Jurnal

- Alfiansyah, M., 2021, "Uji Proporsionalitas dalam Permohonan Pailit oleh Kreditor Separatis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, hlm. 345–366.
- Andika, R., 2019, "Kreditor Separatis dan Eksekusi Jaminan pada Masa Pailit," *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2, hlm. 212–230.
- Chen, X., dan Y. Lee, 2020, "Secured Creditors' Strategic Filings in Insolvency Proceedings: A Good Faith Standard," *International Insolvency Review*, Vol. 29 No. 3, hlm. 275–298.
- Haryono, T., 2021, "Asas Itikad Baik dan Penyalahgunaan Hak," *RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1, hlm. 87–105.
- Putra, Rizky Aditya, 2021, "Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis dalam Penyelesaian Utang Debitor Pailit," Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia.
- Sihombing, Jonathan, 2021, *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Peradilan*, Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Widodo, S., dan Y. Lestari, 2022, "Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Kepailitan Debitor yang Masih Solven," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 8 No. 2, hlm. 145–162.
- Wijaya, R., 2020, *The Principle of Good Faith and Misuse of Rights in Bankruptcy Law*, Tesis S2 Hukum Bisnis Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad No. 23).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

D. Sumber Daring (Online)

- DJKN Kementerian Keuangan RI, 2025, "Artikel & Kajian Peran Kreditor Separatis dalam Kepailitan," diakses 7 November 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

- Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025, *Basis Data Peraturan Perundang-undangan*, diakses 7 November 2025, dari <https://www.kemenkumham.go.id>
- Trisnawati, Putri Ayu, 2022, “Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Pembagian Harta Pailit,” Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, diakses 15 November 2025, dari <https://donibudiono.com>